

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI,  
PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA DESA**

**(Studi Empiris pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Tandun, Rokan IV Koto, dan  
Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019)**

**Popi Pera<sup>1)</sup>, Hj. Yusralaini<sup>2)</sup>, Adhitya Agri Putra<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

*Faculty of Economic and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*Email : [popy.veraasnur20@yahoo.com](mailto:popy.veraasnur20@yahoo.com)*

*The Influence Of Aparatus Competence, Organizational Commitment, Community  
Participation and Internal Control Systems of The Accountability of Village Fund  
Management*

*(Empirical study in 3 Subdistrict namely Tandun, Rokan IV Koto and Pagarantapah  
Darussalam Rokan Hulu Regency in 2019)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of apparatus competence, organizational commitment, community participation, and internal control systems on the accountability of village fund management. The population in this study were all village officials in 25 villages in Tandun, Rokan IV Koto and Pagarantapah Darussalam Districts in Rokan Hulu Regency. The sample in this study were village government officials who implemented village fund management, with the criteria of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, General Head and BPD, with a total sample of 125 respondents chosen by using the purposive sampling method. This study uses primary data by distributing questionnaires. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that apparatus competence, organizational commitment, community participation and internal control systems affect the accountability of village fund management.*

*Keywords: Apparatus Competence, Organizational Commitment, Community Participation, Internal Control Systems and Accountability of Village Fund Management.*

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan pusat kepada daerah (Bicu, 2013:120). Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian

diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat (Nadir, 2013).

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa mempunyai peran yang penting untuk mengurus dan mengatur urusannya. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengetahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Desa diberikan hak istimewa diantaranya pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kemakmuran masyarakat, baik dari sisi pembangunan maupun sisi operasional. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Subroto, 2009).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam

pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan (Riyanto, 2015).

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Jumlah dana yang besar dan semakin meningkat tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu titik kritisnya adalah dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Untuk itu dalam tata kelola dana desa yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab kepala desa diperlukan kemampuan manajerial yang baik, atau kompetensi dari kepala desa serta aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Adapun fenomena yang membahas permasalahan mengenai pengelolaan keuangan desa seperti dikemukakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerima 900 laporan tentang dugaan penyelewengan keuangan desa di Indonesia, dan dari beberapa kasus yang dilaporkan tersebut, sebagian terbukti terjadi penyelewengan dan sebagian masih

diselidiki. Rata-rata kasus penyelewengan dana tersebut karena penggunaannya tidak sesuai prioritas, misalnya untuk kepentingan pribadi seperti membangun pagar rumah kepala desa. Selain itu, untuk membeli mobil atau aparat desa memanfaatkan uang desa tanpa melibatkan musyawarah desa (ratna puspita. <http://www.REPUBLIKA.CO.ID>, *senin 09 oct 2017 22:50 WIB*).

Fenomena yang ditemukan di kecamatan Tandun kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu terdapat temuan penyelewengan dana desa yang mana Kepala Desa dan Sekretaris Desa koto tandun mengungkapkan dana desa tahun 2016 yang dialokasikan untuk Pembangunan Balai Desa dan Honor Guru PAUD di Desa Koto Tandun sejumlah Rp 268 juta tidak realisasikan (fiktif). “Sekretaris Desa Koto Tandun membenarkan hal tersebut. “iya, dana desa tahun 2016 itu tidak dikerjakan untuk membangun balai desa,” tuturnya. Kepala Desa Onto dan Sekretaris Desanya, kini honor PAUD pun habis diduga dibabat oknum mantan Kepala Desa tersebut dan berharap kiranya agar TA bermurah hati secepatnya mengembalikan dan desa tersebut. (r.lubis. <http://www.wartakriminal.co.id>, 5 Maret 2017, 7:47pm).

Dalam pengelolaan dana desa ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal. Faktor pertama yaitu kompetensi aparatur, yang meliputi pengetahuan serta keahlian teknis dan antar personal individu (Robbins dan Judge, 2008:98). Kompetensi aparatur pada dasarnya tidak cukup hanya diukur dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga dapat diukur melalui peningkatan motivasi serta pengalaman

kerja. Tetapi hal tersebut tidak berlaku mempengaruhi jika kompetensi aparatur dalam melaksanakan sistem pelaporan keuangan desa dirasa masih belum memadai. Aparatur desa yang sudah bekerja lama atau telah memiliki pengalaman belum tentu dapat mengimplementasikan serta dapat menerapkan sebuah tata pemerintah dana desa dengan baik dibandingkan aparatur desa yang baru (Indrajaya, 2017).

Faktor kedua yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan tujuan-tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins and Judge, 2000:101). Komitmen organisasi juga merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi sangat diperlukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi.

Selain itu, faktor yang ketiga yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan suatu pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya (Lubis, 2010:238). Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya.

Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya.

Faktor ke empat yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal, Menurut Mahmudi (2011: 251) sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian internal yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kompetensi Aparatur, komitmen organisasi, partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan Rumusan masalah nya:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kompetensi aparatur

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan (Riyanto, 2015).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### **Kompetensi Aparatur**

Kompetensi aparatur yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Menurut Mada, dkk. (2017) mengatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan.

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen merupakan suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, komitmen organisasi berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan (Robbins dan Judge, 2009:101). Komitmen organisasi merupakan rasa untuk tetap mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi dan tetap berusaha dengan segala kemampuannya demi tercapainya tujuan dan kepentingan organisasi.

Cut Zurnali (2010) mendefinisikan pengertian komitmen organisasional dengan mengacu pada pendapat Meyer dan Allen, Curtis dan Wright, dan S.G.A. Smeenk, et al dimana komitmen organisasional didefinisikan sebagai sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasi yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen

yaitu: Komitmen afektif (*affective commitment*), Komitmen kontinyu (*continuance commitment*), Komitmen normatif (*normative commitment*).

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta atau ikut serta untuk mengambil bagian dalam kegiatan tertentu. Kamus Bahasa Indonesia (KBI) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Partisipasi adalah suatu "proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya" (Lubis, 2010:238).

Menurut Renyowijoyo (2008:19), Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengertian sistem pengendalian internal dalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kenadalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi,2013)

Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah adalah

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi aparatur menjadi satu faktor yang penting untuk dibahas mengingat kompetensi merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting. Kompetensi aparatur dipemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola dana desa yang terbilang cukup besar (Firdaus, 2019).

H<sub>1</sub>: Kompetensi Aparatur Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dibutuhkan kesiapan pemerintah desa, salah satu yang perlu dipersiapkan pemerintah desa adalah komitmen. Komitmen organisasi sangat diperlukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Teori penetapan tujuan (*goal theory*) menyatakan bahwa perilaku seseorang individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Adanya komitmen

organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa agar program-program kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan wujud komitmen aparatur desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

H<sub>2</sub>: Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

H<sub>3</sub>: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. H<sub>4</sub>: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Tandun, Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Umum dan BPD pada masing-masing Desa di Kecamatan Tandun, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Kecamatan Pagarantapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sehingga sampel yang diambil untuk penelitian ini berjumlah 125 responden.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu dengan menggunakan kuesioner. Data tersebut berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada masing-masing responden di setiap Desa di Kecamatan Tandun, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Kecamatan Pagarantapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014:199).

## **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **Kompetensi Aparatur (X1)**

Kompetensi Aparatur merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan (Moeheriono, 2014:21). indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Lalita Ivana Maria Ladapase (2019), yaitu Pengetahuan (*Knowledge*), Keahlian (*Skill*), dan Perilaku (*Attitude*).

### **Komitmen Organisasi (X2)**

Robbins dan Judge (2009:101) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Indikator kuesioner yang

digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Zela Prabawaning Tyas (2014), yaitu komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*).

### **Partisipasi Masyarakat (X3)**

Partisipasi masyarakat adalah suatu “proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya” (Lubis, 2010:238. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Kadek Sutrawati (2016), yaitu Terlibat dalam perencanaan, Memberi masukan, Terlibat dalam pelaksanaan, Mengelola dan melaksanakan pekerjaan, Terlibat dalam penatausahaan, Terlibat dalam pengawasan.

### **Sistem Pengendalian Internal (X4)**

Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan undangan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Muhammad Rosyidi (2018), yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini mempunyai empat hipotesis yang pengujiannya yaitu lewat bantuan “*Statistical Product and Service Solution*” (SPSS). Pengujian 1 hingga 4 mengaplikasikan model Analisis Regresi Linear Berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X1 = Kompetensi Aparatur

X2 = Komitmen Organisasi

X3 = Partisipasi Masyarakat

X4 = Sistem Pengendalian Internal

a = Konstanta

$\beta$  = Koefisien arah regresi

e = Faktor Pengganggu (Error)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Statistik deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variable akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki total skor jawaban responden sebesar 16.600 dengan nilai minimal 3.720, nilai maksimal 18.600, rata-rata skor sebesar 4,46 dan standar deviasi sebesar 11,897. Kriteria posisi jawaban responden terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan kriteria sangat baik, karena berada pada *range* 84%-100% yaitu 89,25%.

### **Kompetensi Aparatur**

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki total skor jawaban responden sebesar 6.084 dengan nilai minimal 1.364, nilai maksimal 6.820, rata-rata skor sebesar 4,46 dan standar deviasi sebesar 4,442. Kriteria posisi jawaban responden terhadap kompetensi aparatur menunjukkan kriteria sangat baik, karena berada pada *range* 84%-100% yaitu 89,21%.

### Komitmen Organisasi

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel komitmen organisasi memiliki total skor jawaban responden 4.155 dengan nilai minimal 1.116, nilai maksimal 5.580, rata-rata skor sebesar 3,72 dan standar deviasi sebesar 6,823. Kriteria posisi jawaban responden terhadap komitmen organisasi menunjukkan kriteria cukup baik, karena berada pada *range* 52%-68% yaitu 62,35%.

### Partisipasi Masyarakat

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki total skor jawaban responden sebesar 3.142 dengan nilai minimal 868, nilai maksimal 4.340, rata-rata skor sebesar 3,62 dan standar deviasi sebesar 3,154. Kriteria posisi jawaban responden terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan kriteria baik, karena berada pada *range* 68%-84% yaitu 72,40%.

### Sistem Pengendalian Internal

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki total skor jawaban responden sebesar 7.781 dengan nilai minimal 1.860, nilai maksimal 9.300, rata-rata skor sebesar 4,18 dan standar deviasi sebesar 6,739. Kriteria posisi jawaban responden terhadap sistem pengendalian internal menunjukkan kriteria baik, karena berada pada *range* 68%-84% yaitu 83,67%.

### Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel pada taraf signifikansi 5% untuk uji 2 sisi, Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka alat ukur yang digunakan dinyatakan valid, sedangkan jika  $r$  hitung  $\leq$   $r$  tabel maka alat ukur yang digunakan tidak valid. Nilai  $r$  tabel dapat diperoleh

dengan persamaan  $n-2$ .  $n$  merupakan jumlah responden dalam penelitian ini, sehingga  $124-2 = 122$ , dan diperoleh  $r$  tabel = 0,176.

Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pernyataan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal memiliki  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel ( $r$  hitung  $>$  0,176), maka dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator dari variabel dalam suatu kuisoner. Uji reabilitas dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cornbach's Alpha*. Jika koefisien alpha yang dihasilkan  $\geq 0,6$ , maka indikator tersebut dikatakan reliabel atau dapat dipercaya.

**Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Koefisien Alpha
Kompetensi Aparatur (X1)	0,888	0,60
Komitmen Organisasi (X2)	0,917	0,60
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,628	0,60
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,908	0,60
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,959	0,60

Sumber: Data Olahan 2020

Dari kelima variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,600, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

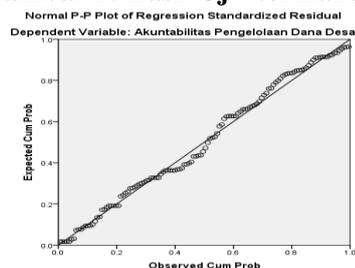
Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik, yaitu bebas dari normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Dalam model

regresi, nilai residual harus mengikuti distribusi normal dan terbebas dari korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009).

### Hasil Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi telah berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk menentukan normalitas residual digunakan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2013:160). Dengan menggunakan *normal P-P Plot* dapat dilihat apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**



**Sumber:** Data Olahan 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Uji multikolinearitas dibuktikan dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika hasil pengujian menyatakan bahwa nilai  $VIF < 10$  dan nilai  $tolerance > 0,10$  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai  $VIF > 10$  dan nilai

$tolerance < 0,10$  maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Aparatur	0,670	1,493
Komitmen Organisasi	0,983	1,017
Partisipasi Masyarakat	0,850	1,177
Sistem Pengendalian Internal	0,693	1,444

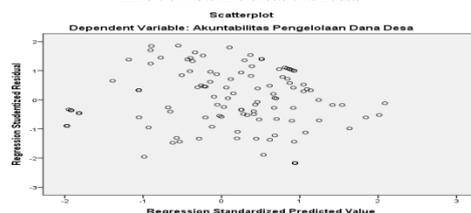
**Sumber :** Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF variabel tersebut lebih kecil dari 10, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

### Hasil Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, meleber, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Sumber :** Data Olahan 2020

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun dibawa angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda ini tidak hanya melihat berpengaruh signifikan atau tidak variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga dapat melihat arah dari pengaruh tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 26.106 + 0,915X_1 + 0,244X_2 + 0,848X_3 + 0,543X_4 + e$$

Keterangan:

$\alpha$  = Nilai konstanta (a) sebesar 26.106. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai 26.106.

$\beta_1$  = Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur (X1) sebesar 0,915. Artinya setiap peningkatan kompetensi aparatur sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,915.

$\beta_2$  = Nilai koefisien regresi variabel komitmen organisasi (X2) sebesar 0,244. Artinya setiap peningkatan komitmen organisasi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,244.

$\beta_3$  = Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,848. Artinya setiap peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,848.

$\beta_4$  = Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X4) sebesar 0,543. Artinya setiap peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,543.

e = Standar *error* merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

### Pembahasan

#### Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama**

Variabel Independen	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Kompetensi Aparatur	4.221	1,979	0,000	Berpengaruh

Sumber: *Data Olahan 2020*

Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 4.221 > 1,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua**

Variabel Independen	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Komitmen Organisasi	2.092	1,979	0,039	Berpengaruh

Sumber: *Data Olahan 2020*

Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,092 >

1,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 dan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H0 ditolak dan H2 diterima. Oleh karena itu, komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

**Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga**

Variabel Independen	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	3.128	1,979	0,002	Berpengaruh

**Sumber:** *Data Olahan 2020*

Dari tabel 5 diatas terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 3.128 > 1,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H0 ditolak dan H3 diterima. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

**Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat**

Variabel Independen	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	3,860	1,979	0,000	Berpengaruh

**Sumber:** *Data Olahan 2020*

Dari tabel 6 diatas terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,860 > 1,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H0 ditolak dan H4 diterima. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian ini menyimpulkan, "Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".

Keterbatasan pada penelitian ini ialah: 1) Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada aparat pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tandun, Rokan IV Koto dan Pagarantapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu saja. Sehingga belum memberikan gambaran yang lebih jelas maupun menggeneralisasi keadaan pada daerah yang lainnya. 2) Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung kepada responden, mengingat kesibukan dari masing-masing responden dan responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. 3) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal. Diduga masih banyak faktor lain yang dapat menjadi variabel independen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya: 1) Penelitian ini hanya menggunakan 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu pada Desa-desa yang ada diseluruh Kabupaten Rokan

Hulu. Apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda. 2) Dalam penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara kepada seluruh responden yang memungkinkan dapat untuk dipantau secara langsung dan responden juga bisa bertanya langsung kepada peneliti terkait pertanyaan yang mungkin kurang dimengerti oleh responden sehingga mungkin peneliti lebih dapat mengendalikan jawaban tiap responden. 3) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, mengingat masih banyak nya variabel lain yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa seperti, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi dan Pemahaman Aparatur Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Riyanto (2015). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta.
- Agus Subroto 2009 “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*”.
- Bicu, YS. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cipta Harta Prima.
- Cut Zurnali. 2010. *Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, dan Customer Orientation : Knowledge Worker – Kerangka Riset Manajemen Sumberdaya Manusia pada Masa Depan*. Penerbit Unpad Press. Bandung.
- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Tujuh*.
- Halim, Firdaus. 2019. *Pengaruh Transparansi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
- Indrajaya, Johan Arief. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa*.
- Ladapase, Lalita Ivana Maria. 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka*.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mada,Sarifudin.,Kalangi,Lintje dan Gamaliel Hendrik. 2017.*Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Universitas Sam Ratulangi.

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Cetakan kedua. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nadir, Sakinah. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Politik Profetik. Vol.1, No.1. Hal.1-21
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Robbins, Stephen P, dan Timothy A Judge. 2009. *Perilaku Organisasi Buku 1 Edisi 12*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosyidi, Muhammad. 2018. *Pengaruh Transparansi, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)*. Universitas Riau.
- Sugiarti, Ekasari., dan Ivan, Yudianto. 2017. *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)*. Universitas Padjajaran.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung. Alfabeta
- Sutrawati, Kadek. 2016. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*. Universitas Halu Oleo.
- Tyas, Zela Prabawaning. 2014. *Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan (studi pada PT.BRI (persero).Tbk. Cabang Sumenep 2013-2014)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Negara Republik Indonesia
- <http://www.wartakriminal.co.id>, 5 Maret 2017
- <http://www.REPUBLIKA.CO.ID>